

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 54
Juni 2023



Menentukan Arah.
**Memimpin di
Kancah Dunia.**

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:

Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:

Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

KTT ASEAN ke-42: Menuju Diplomasi Digital

Indonesia, sebuah negara kepulauan yang begitu kaya akan sumber daya dan budaya, sekali lagi mengambil peran yang tidak ringan di panggung internasional. Setelah sukses menjadi tuan rumah untuk KTT G20, Indonesia kembali menjadi fokus perhatian dunia sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42. Ini bukan sekadar peristiwa; tetapi ini adalah misi. Sebuah misi yang menempatkan Indonesia dalam posisi strategis untuk tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga membentuk masa depan Asia Tenggara.

Peran Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN ini bukanlah tugas yang ringan, terutama dalam dunia yang serba digital dan terhubung. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai penanggung jawab utama di lini terdepan teknologi informasi, berperan vital untuk menjamin kelancaran komunikasi dan pertukaran informasi. Infrastruktur yang solid, keamanan siber yang terjamin, serta strategi komunikasi yang efektif menjadi prasyarat yang tak bisa diabaikan.

Indonesia bukan lagi pemain pinggiran di panggung internasional. Posisinya sebagai anggota G20 dan ASEAN, serta sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi motor penggerak dalam pembahasan isu-isu kritis. Baik itu isu tradisional



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

seperti politik dan ekonomi, atau bahkan isu-isu modern seperti diplomasi digital, yang kini telah menjadi bagian integral dari tatanan dunia baru.

KTT ASEAN juga menjadi tolok ukur efektivitas dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi era baru ini. Keberhasilan dalam menyelenggarakan konferensi ini tidak hanya akan menaikkan pamor Indonesia, tetapi juga akan menjadi indikator kuat mengenai kesiapan negara ini dalam menghadapi berbagai tantangan multidimensi yang semakin kompleks. Di tengah rivalitas geopolitik dan ekonomi yang terus meningkat, serta tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan sosial, keberhasilan dalam penyelenggaraan KTT ini menandakan bahwa Indonesia tidak hanya siap untuk berpartisipasi, tetapi juga untuk memimpin.

Tak kalah pentingnya, media memegang peran yang sangat strategis dalam membentuk opini publik. Dalam era informasi yang serba cepat ini, transparansi dan akurasi informasi adalah dua hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, media memiliki tugas yang tak ringan untuk menjaga integritas informasi, agar kebenaran tidak terkubur di bawah hiruk-pikuk informasi yang kerap kali menyesatkan.

Dalam konteks inilah KTT ASEAN ke-42 menjadi begitu penting. Ini bukan hanya tentang suatu acara atau peristiwa, tetapi tentang bagaimana Indonesia, dengan seluruh kekayaan dan keragamannya, memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depan Asia Tenggara. Ini adalah waktu di mana kita, sebagai bangsa, harus menunjukkan kapabilitas, integritas, dan komitmen kita terhadap isu-isu yang mempengaruhi kita semua, baik sebagai individu maupun sebagai anggota komunitas global.

Kesuksesan Indonesia dalam menggelar perhelatan internasional tingkat Asia Tenggara ini kami kemas secara apik dan kami sajikan untuk rekan-rekan pembaca dalam KominfoNext edisi ke-54.

Selamat membaca!



...media memiliki tugas yang tak ringan untuk menjaga integritas informasi, agar kebenaran tidak terkubur di bawah hiruk-pikuk informasi yang kerap kali menyesatkan



Presiden Joko Widodo meninjau langsung pusat media atau media center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 9 Mei 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Jokowi Tinjau Pusat Media KTT Ke-42 ASEAN

Presiden Joko Widodo meninjau langsung pusat media atau media center Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa, 9 Mei 2023. Setibanya di Hotel Bintang Flores sekitar pukul 13.20 WITA, Presiden Jokowi langsung menuju area lobi dan meja registrasi untuk para jurnalis yang meliput perhelatan KTT ke-42 ASEAN.

Setelah itu, Presiden menuju area bawah dan menyapa para jurnalis yang sedang berkumpul. Tampak Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut mendampingi Presiden.

“Selamat siang semuanya,” ucap Presiden seraya melambaikan tangan kepada para jurnalis.

Presiden kemudian melihat area yang akan digunakan untuk menggelar konferensi pers, pusat penyiaran internasional, dilanjutkan area

kerja jurnalis berikut fasilitas pendukungnya. Presiden juga sempat menanyakan tentang kualitas koneksi internet kepada beberapa jurnalis.

“Bagaimana WiFi-nya lancar?” tanya Presiden.

Sejumlah jurnalis mengaku terkejut dengan kedatangan Presiden Jokowi ke area mereka bekerja. Vengadeshwaran Subramaniam misalnya, jurnalis asal Singapura tersebut mengaku tidak menyangka akan bertemu Presiden Jokowi ketika sedang bekerja.

Hal senada dirasakan oleh Silkina Ahluwalia, koresponden China Global TV Network, yang mengaku baru pertama kalinya berjumpa secara langsung dengan Presiden Jokowi. Padahal, ia sudah beberapa kali meliput kegiatan yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi seperti KTT G20 di Bali November 2022 lalu.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-tinjau-pusat-media-ktt-ke-42-asean/>

Percepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Wapres Luncurkan **MPP** **Digital Nasional**



Pemerintahan berbasis digital atau *digital governance* menjadi sebuah keniscayaan. Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola komunikasi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.

Terlebih, tercatat kurang lebih 78 persen dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel.

Merespons ruang komunikasi yang kian terbuka lebar tersebut, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan secara berkelanjutan langkah-langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.

"Sebagai upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi, pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan," pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri *Soft Launching* MPP Digital Nasional, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (20/06/2023).

Lebih jauh, Wapres menyatakan, MPP digital menjadi salah satu terobosan yang didesain pemerintah untuk mewujudkan transformasi tersebut. Menurutnya, upaya ini juga sangat relevan dengan arah pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Wapres meminta MPP digital agar diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan *stunting*.

Dalam kesempatan yang sama, Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya.

<https://www.wapresri.go.id/percepat-peningkatan-kualitas-pelayanan-publik-wapres-luncurkan-mpp-digital-nasional/>

Presiden Jokowi Buka **KTT Ke-42 ASEAN Tahun 2023** di Labuan Bajo

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan situasi yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas yang makin tajam, serta dinamika dunia yang makin tidak terprediksi.



Presiden Joko Widodo secara resmi membuka perhelatan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN yang digelar di Ballroom Komodo, Meruorah *Convention Center*, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu, 10 Mei 2023. Upacara pembukaan dibuka dengan himne "*The ASEAN Way*".

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan situasi yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, rivalitas yang makin tajam, serta dinamika dunia yang makin tidak terprediksi. Di tengah situasi tersebut, Presiden meyakini jika ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan.

"Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya: persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan," ujar Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ASEAN memiliki aset kuat sebagai pusat pertumbuhan atau *epicentrum of growth*.

Selain itu, ASEAN juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang tumbuh jauh di atas rerata dunia, bonus demografi, hingga kestabilan kawasan yang terjaga.

"Ke depan, ASEAN harus makin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerja sama inklusi—termasuk implementasi RCEP (*Regional Comprehensive Economic Partnership*)—dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan," jelasnya.

"Mari bekerja keras menjadikan *ASEAN Matters, Epicentrum of Growth*, dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka," tandas Presiden.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam upacara pembukaan KTT ke-42 ASEAN yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

<https://www.presidenti.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-buka-ktt-ke-42-asean-tahun-2023-di-labuan-bajo/>



“

**Mari bekerja keras
menjadikan ASEAN Matters,
Epicentrum of Growth, dan
dengan ini saya nyatakan
KTT ke-42 ASEAN dibuka**

KOLEKSI BUKU BARU PERPUSTAKAAN KOMINFO



Selain judul buku diatas, ada juga terbitan dari
pengarang : **Tere Liye, Ika Natassa, Agatha
Christie, Almira Bastari, Leila S. Chudori, Keigo
Higashino, Matt Haig, Dee Lestari, C.S Lewis, Rick
Riordan, Enid Blyton, Maman Suherman, Valerie
Patkar, dan lainnya**

Layanan Perpustakaan

Senin – Kamis	Jam 09.00–15.00
Jumat	Jam 09.00–11.30 Jam 13.30–15.30

Akses katalog di

<http://perpustakaan.kominfo.go.id/>

(hanya bisa diakses dari jaringan internal kominfo)

Perpustakaan Kementerian Kominfo

Gedung Belakang Lt 1 Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat

Efektivitas Penyuluh Informasi Publik di Era Digital



Halo Sobatkom!

Di era digital yang serba cepat ini, informasi bisa dengan mudah didapatkan hanya dengan beberapa ketukan pada layar ponsel. Namun, akses ke informasi yang cepat dan mudah ini seringkali terbatas pada wilayah perkotaan atau daerah dengan infrastruktur komunikasi yang memadai.

Lalu, bagaimana dengan masyarakat di daerah yang terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) atau mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses ke teknologi komunikasi? Penyuluh Informasi Publik (PIP), sebuah inisiatif dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan informasi ini. Sejak pertama kali direkrut pada Oktober 2017, PIP telah membantu menyebarkan informasi penting dari pemerintah ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Program ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan akses informasi, tetapi juga menjadi perwujudan dari kolaborasi antara berbagai sektor pemerintah untuk membangun karakter bangsa.

“...hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan informasi”

Pendekatan Tatap Muka

Salah satu keunikan dari program Penyuluh Informasi Publik (PIP) adalah pendekatan tatap muka yang diaplikasikan dalam kegiatan diseminasi informasinya. Di era di mana komunikasi digital mendominasi, pendekatan konvensional ini tampaknya bertentangan dengan arus. Namun, di wilayah 3T, metode ini justru menunjukkan efektivitas yang signifikan.

Di daerah yang termasuk dalam kategori 3T, banyak faktor yang membuat pendekatan digital kurang efektif. Selain masalah infrastruktur, faktor lain seperti literasi digital rendah, minimnya akses ke perangkat teknologi, serta ketidakmampuan ekonomi masyarakat lokal untuk mengakses internet menjadi alasan utama. Pendekatan tatap muka menjadi metode yang lebih reliabel dalam konteks ini karena tidak memerlukan perangkat atau koneksi internet.

Tidak hanya itu, pendekatan tatap muka juga memiliki manfaat psikologis dan sosial yang signifikan. Dalam konteks komunitas yang berskala kecil dan erat, informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut melalui interaksi sosial memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Ini sangat penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Selain itu, metode ini juga memungkinkan penyuluh untuk lebih memahami konteks dan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, sehingga penyampaian informasi bisa lebih disesuaikan dan lebih efektif.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep "*cater to the heart and head*," yang menjadi salah satu prinsip utama dalam implementasi program PIP. Dengan interaksi tatap muka, penyuluh memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau emosi dan kebutuhan nyata masyarakat. Ini penting, terutama dalam konteks diseminasi informasi yang seringkali membutuhkan pemahaman emosional dan kognitif dari masyarakat untuk berhasil diterapkan.



“

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep "*cater to the heart and head*,"



Kolaborasi dengan Kementerian Agama

Implementasi program PIP tidak berjalan sendiri. Ada kolaborasi yang telah disepakati antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Agama sejak Juli 2017. Kolaborasi ini memiliki dua misi utama: diseminasi informasi dan pembangunan karakter bangsa.

Sejak 2017, PIP telah berhasil menjangkau 362.446 orang di 668 kecamatan yang berada di 265 kabupaten/kota di 34 provinsi. Angka ini menunjukkan efektivitas dari metode tatap muka dalam menyampaikan informasi, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Selain itu, program ini juga menjadi medium efektif untuk menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah terkait program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur komunikasi.

Sejak 2017 telah menjangkau

362.446 Orang

668 Kecamatan

265 Kabupaten/kota

Pengukuran Kinerja PIP

Seperti program pemerintah lainnya, efektivitas dan kinerja PIP juga perlu diukur secara konsisten. Artikel ini akan membahas indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberhasilan PIP dalam diseminasi informasi publik.

Kinerja PIP diukur berdasarkan dua indikator utama:

01 Jumlah pertemuan atau frekuensi kegiatan diseminasi

Mencakup jumlah pertemuan atau kegiatan tatap muka yang diadakan oleh PIP dalam satu bulan yaitu minimal 2 hingga maksimal 6 pertemuan per bulan, dengan ketentuan maksimal satu kegiatan dalam satu hari.

02 Kepatuhan dan kesesuaian dalam menyampaikan laporan

Penyuluh diharapkan untuk membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan mereka secara rutin setiap bulan.



Salah satu aspek penting lainnya dalam menilai kinerja PIP adalah kualitas dan keakuratan konten informasi yang disebar. Konten yang disebar oleh PIP bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sudah tersedia pada sistem informasi PIP.

Dalam penyebarannya, konten dapat dimodifikasi asalkan tidak mengubah arti dan maksud dari informasi tersebut. Selain itu, informasi insidental dapat disebar melalui media sosial untuk menambah nilai kinerja PIP.

Mengukur kinerja PIP menggunakan indikator-indikator ini tidak hanya membantu dalam menilai efektivitas penyuluh tetapi juga membantu dalam perencanaan dan penyesuaian strategi program untuk masa depan. Dengan memahami frekuensi dan kualitas interaksi tatap muka, serta kepatuhan dalam pelaporan, pihak berwenang dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas program.

PIP merupakan salah satu bukti konkret dari komitmen pemerintah untuk memperkuat literasi informasi di seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah 3T. Melalui pendekatan yang tepat dan kolaborasi antar-sektor, komunikasi publik bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk pemberdayaan masyarakat.

E-SIM

Teknologi yang Mengubah Lanskap Komunikasi Seluler dan IoT

Dalam era digital yang serba cepat, mendorong adanya adaptasi dan inovasi terus menerus, termasuk mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satu komponen vital dalam dunia komunikasi seluler adalah kartu SIM (*Subscriber Identification Module*). Namun, teknologi yang berpotensi mengubah hampir semua aspek komunikasi seluler dan IoT (*Internet of Things*) adalah eSIM



Teknologi eSIM tidak muncul dalam sekejap. Ia merupakan hasil dari perkembangan panjang dalam dunia telekomunikasi yang diinisiasi oleh GSMA—organisasi global yang mewakili kepentingan operator seluler. Melalui berbagai forum dan diskusi, akhirnya muncullah standar eSIM yang kita kenal sekarang. Standar ini menetapkan bahwa eSIM harus bisa diprogram ulang, sehingga memberikan fleksibilitas kepada pengguna.

Berbeda dari kartu SIM fisik yang harus ditempatkan pada slot khusus, eSIM adalah sebuah *chip* kecil yang tertanam dalam perangkat dan bisa diprogram ulang jarak jauh. Ini membuka kemungkinan perangkat untuk berpindah antar operator tanpa perlu mengganti kartu fisik. Selain itu, eSIM mendukung profil multi-operator, yang memudahkan perangkat untuk berpindah antar jaringan tanpa harus mengganti konfigurasi atau kartu.

“ Berbeda dari kartu SIM fisik yang harus ditempatkan pada slot khusus, eSIM adalah sebuah chip kecil yang tertanam dalam perangkat dan bisa diprogram ulang jarak jauh.



Menggunakan enkripsi dan teknologi keamanan lainnya, eSIM memastikan bahwa data Anda aman dari akses ilegal

Salah satu keunggulan dari eSIM adalah tingkat keamanannya yang lebih tinggi dibandingkan kartu SIM fisik. Menggunakan enkripsi dan teknologi keamanan lainnya, eSIM memastikan bahwa data Anda aman dari akses ilegal. Selain itu, risiko kehilangan atau kerusakan kartu SIM bisa dieliminasi karena *chip* ini tertanam langsung pada perangkat.

Fleksibilitas adalah kata kunci utama dari eSIM. Bayangkan ketika Anda bepergian antarnegara, Anda tidak perlu lagi mengganti *SIM card* untuk memakai jaringan lokal—semuanya bisa diatur jarak jauh. Hal ini juga berlaku untuk IoT. Misalnya, perangkat smart home yang bisa dengan mudah beralih antar jaringan sesuai kebutuhan, tanpa perlu intervensi fisik.

Namun, salah satu hambatan eSIM adalah kompatibilitas. Tidak semua operator seluler saat ini mendukung eSIM, dan juga belum semua perangkat kompatibel dengan teknologi ini. Selain itu, ada pula isu-isu regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi adopsi eSIM, terutama dalam hal portabilitas nomor dan persaingan antar operator.

Beberapa operator seluler besar di dunia, seperti AT&T, Vodafone, dan Singtel, sudah mulai memasukkan eSIM sebagai bagian dari layanan mereka. Sedangkan di Indonesia baru ada Smartfren dan Indosat yang menawarkan eSIM ini. Dalam konteks IoT, eSIM juga mulai digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari *smart home* hingga *telemetry* dalam industri otomotif.

eSIM bukan hanya sebuah langkah revolusioner dari kartu SIM fisik; ia adalah revolusi dalam dunia komunikasi seluler dan IoT. Dengan kemudahan, fleksibilitas, dan keamanan yang ditawarkannya, eSIM siap untuk membentuk masa depan komunikasi yang lebih cerdas dan lebih terhubung. Walaupun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, potensinya sudah sangat jelas.

Dengan peningkatan adopsi dan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari operator hingga produsen perangkat, eSIM memiliki potensi untuk menjadi standar baru dalam dunia telekomunikasi. Dalam beberapa tahun ke depan, kita mungkin akan melihat bagaimana eSIM tidak hanya mempengaruhi komunikasi antar manusia, tetapi juga komunikasi antar perangkat dalam ekosistem IoT yang semakin kompleks.





Dukungan Infrastruktur Digital dan Komunikasi untuk KTT ASEAN 2023



Indonesia kali ini memegang Keketuaan ASEAN 2023 dengan mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Dari tema tersebut Indonesia ingin mendorong kawasan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan global.

Setelah sukses menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada November 2022, Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan sebagai tuan rumah untuk acara internasional yang tak kalah prestisius: KTT ASEAN ke-42. Rangkaian acara ini berlangsung mulai tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah untuk perhelatan ini menandai peran strategis Indonesia dalam mewujudkan cita-cita utama ASEAN: menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Konferensi ini dihadiri oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN, serta Timor Leste, yang kini berstatus sebagai negara *observer* sesuai hasil KTT ke-40 dan ke-41 di Kamboja.

KTT ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur adalah gelaran pertama dari dua KTT yang akan diadakan di bawah Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk tahun 2023. Di pertemuan ini, para pemimpin ASEAN membahas berbagai isu internal dan regional, termasuk penguatan institusi ASEAN, penyusunan Visi ASEAN Pasca 2025, dan perkembangan di Myanmar. Sedangkan KTT ke-43, yang akan diadakan pada September 2023 di Jakarta, akan fokus pada pembahasan kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal.

Salah satu kunci kesuksesan pertemuan forum internasional adalah dukungan optimal dari infrastruktur digital dan komunikasi publik. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI telah siap siaga menyediakan keduanya untuk menyukseskan rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (KTT ASEAN) 2023.

Indonesia kali ini memegang Keketuaan ASEAN 2023 dengan mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth". Dari tema tersebut Indonesia ingin mendorong kawasan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan global.

Proyeksi IMF menyebutkan, pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan sebesar 2,7 persen, menurun dibandingkan 3,2 persen (2022) dan 6 persen (2021). Sehingga masih ada bayang-bayang resesi global.

Sementara itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mewarnai kondisi ekonomi saat ini dan diprediksi masih akan terus berlanjut. Meskipun ekonomi global diproyeksikan menurun, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara masih berada di atas pertumbuhan rata-rata dunia.

Dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan ASEAN mencapai 3,98 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,6 persen. Proyeksi pertumbuhan di kawasan ASEAN pada 2022 sebesar 5,1 persen.

Itu merupakan tren positif yang ingin dipertahankan oleh Keketuaan Indonesia. Selain itu, diharapkan asumsi ekonomi makro ASEAN dapat diwujudkan melalui kemakmuran yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat ASEAN.

Oleh karena itu, Keketuaan Indonesia juga memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk kepentingan perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Tidak itu saja, Indonesia sebagai ketua juga terus mendorong dan memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Indonesia diharapkan bisa berperan penting dalam pengelolaan kerja sama ASEAN sebagai ekonomi terbesar ke-5 di dunia dengan nilai US\$ 3,3 triliun, yang juga melibatkan ekonomi mitra ASEAN senilai US\$ 84,6 triliun, menurut data 2021.

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN mempercepat implementasi agenda-agenda strategis di berbagai bidang yang akan





memajukan perekonomian kawasan. Guna membahas berbagai substansi di bidang ekonomi, belum lama ini digelar pertemuan menjelang KTT ASEAN, sejumlah isu berkaitan dengan ekonomi.

Setidaknya ada dua agenda utama dari KTT ke-42 ASEAN 2023 atau *ASEAN Summit 2023* yang digelar di Indonesia. "*ASEAN Summit 2023 akan* berlangsung dua kali. Pertama dilaksanakan pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, bagi negara-negara anggota ASEAN. Kemudian, yang kedua pada September 2023 di Jakarta dengan negara mitra wicara, misalnya ASEAN+3 yang terdiri dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Lalu ada pula ASEAN plus CER (*Closer Economic Relations*) yang terdiri atas Australia dan Selandia Baru," jelas Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong, dalam Konferensi Pers: Dukungan Kesiapan Kominfo pada ASEAN Summit 2023, di Ruang *Media Center* Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (24/3/2023).

Hadir mendampingi Dirjen Usman, Ketua Tim Pusat Monitoring Telekomunikasi Direktorat Pengendalian Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo Indra Apriadi. Dia mengatakan, menyangkut dukungan infrastruktur telekomunikasi digital, saat ini telah terbangun jaringan kabel serat optik sepanjang 3.773 km dan sebaran *Optical Distribution Point* (ODP) sebanyak 2.055 titik.

Menurut Indra Apriadi, kini secara keseluruhan wilayah Labuan Bajo telah terjangkau sinyal 4G sekitar 78,12 persen. Sedangkan, area pemukiman sudah meliputi sekitar 94,51 persen, dan di beberapa titik terdapat cakupan sinyal 5G.

"Labuan Bajo sudah pernah melakukan *event* G20. Sinyal 4G dan 5G tersebut dilayani oleh 1.635 BTS 4G dan tiga BTS 5G. Ada empat penyelenggara telekomunikasi di Labuan Bajo, dan ada juga operator *fixed broadband* yang sudah ada di sana. Termasuk sudah ada beberapa titik 5G yang sudah ada di Labuan Bajo," ungkapnya.

“

Meskipun ekonomi global diproyeksikan menurun, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara masih berada di atas pertumbuhan rata-rata dunia.

Untuk mendukung penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, Kementerian Kominfo dan penyelenggara telekomunikasi khususnya Telkom Group tengah menyediakan *BTS Combat*. Di samping itu, mereka melakukan upgrade untuk BTS eksisting di Golomori (lokasi KTT) dan kawasan Labuan Bajo.

“Saat ini masih berjalan dengan progres sebesar 44,7 persen serta ditargetkan akan selesai pada minggu kedua April 2023,” ujar Indra Apriadi.

Kementerian Kominfo juga terus memantau kualitas layanan telekomunikasi agar bisa terjaga dengan baik. Kominfo memakai aplikasi *signal monitoring* atau sigmon yang memantau kualitas layanan dan terhubung langsung dengan penyelenggara telekomunikasi seluler. Kominfo juga membuka layanan aduan bagi masyarakat selama 24 jam.

Pengamanan Frekuensi Radio

Selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dilaksanakan, tanggal 10 s.d 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang (Balmon Kupang) bertanggung jawab melakukan pengamanan frekuensi radio.

Dalam keterangan persnya, Kepala Balai Monitor Kelas I Kupang, Mujiyo, mengungkapkan bahwa keterlibatan Balmon Kelas I Kupang pada event pengamanan itu merupakan tugas yang diemban Ditjen SDPPI dalam suatu tim bersama Direktorat Pengendalian Ditjen SDPPI dan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain : Balmon Kelas I Semarang, Balmon Kelas I Yogyakarta, Balmon Kelas I Denpasar, Balmon Kelas I Samarinda, dan Balmon Kelas II Pontianak.



"Tugasnya kami adalah melakukan pengamanan dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan KTT ASEAN dan Bandara Komodo selama masa persiapan hingga selesainya penyelenggaraan KTT ASEAN," ungkap Mujiyo. Jumat (12/05/2023).

"Selain juga memprioritaskan pengamanan frekuensi penerbangan khususnya di waktu-waktu kedatangan dan keberangkatan Kepala Negara di bandara penunjang yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Hasanuddin Makassar, Bandara El Tari Kupang serta Bandara Lombok," terangnya.

Dikatakan lebih lanjut sebelum melakukan pengawasan dan pengamanan spektrum frekuensi radio KTT ASEAN ke-42. Tim telah melakukan persiapan-persiapan dengan memonitor kependudukan frekuensi serta *monitoring clearance* frekuensi, setelah sebelumnya berkoordinasi secara intensif dengan satuan pengamanan, Airnav, dan PCO.

“ Tugasnya kami adalah melakukan pengamanan dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di lokasi-lokasi prioritas pelaksanaan KTT ASEAN dan Bandara Komodo



Dalam tahap pengawasan di lapangan, Ditjen SDPPI membuat pos monitoring spektrum frekuensi radio pada *venue-venue* dilaksanakannya KTT ASEAN antara lain : Hotel Meruorah, Hotel Ayana, *Media Center* Bintang Flores, Puncak Waringin, dan Bandara Komodo. Selain itu, juga dilakukan penanganan gangguan frekuensi radio jika terdapat aduan frekuensi yang digunakan untuk *event* KTT ASEAN.



Siapkan Fasilitas Media Center untuk Jurnalis

Guna menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023, Kominfo turut menyiapkan dukungan diseminasi informasi dan fasilitasi untuk pendaftaran jurnalis yang meliput rangkaian KTT ASEAN 2023. Dirjen IKP Usman Kansong menegaskan, pihaknya memberi dukungan berupa ekspos di media baik cetak, elektronik, media daring, media sosial, media tatap muka, dan media luar ruang selama Keketuaan ASEAN tahun ini.

Salah satu kanal yang dikelola Kementerian Kominfo berupa laman website resmi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan alamat <https://asean2023.id/>. Menurutnya, pihak Kominfo juga menurunkan tim untuk menulis dan menerjemahkan konten ASEAN. "Pengelolaan konten *website* meliputi penulisan, penyuntingan, pembuatan, penerjemahan, dan pengunggahan konten siaran pers, artikel, berita, infografik dan video terkait Keketuaan ASEAN, pembuatan *microsite* registrasi media dan penyediaan serta pengamanan server maupun *website*," jelas Dirjen Usman.

Dirjen IKP Kementerian Kominfo menjelaskan, Kominfo juga mendukung penyediaan fasilitas untuk pendaftaran bagi jurnalis peliput ASEAN Summit 2023. Menurutnya, laman asean2023.id menjadi laman pendaftaran jurnalis yang meliput KTT ASEAN.

Mengingat adanya keterbatasan tempat, ada seleksi untuk jumlah awak pers yang meliput KTT ASEAN 2023. Dirjen IKP menegaskan, hal itu sama dengan pelaksanaan KTT G20 tahun lalu, hanya *official media* yang ikut serta menempel dengan kepala negara masing-masing yang diperkenankan bisa meliput di *venue* utama KTT ASEAN 2023.

“ Kominfo memakai aplikasi signal monitoring atau sigmon yang memantau kualitas layanan dan terhubung langsung dengan penyelenggara telekomunikasi seluler.

Berkaitan dengan estimasi jumlah wartawan yang akan hadir langsung di lokasi utama penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, Dirjen IKP Kementerian Kominfo memprediksi ada sekitar 300 hingga 500 media akan datang menyaksikan ramahnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara.



Pemerintah pun telah menyediakan *Media Center* KTT ASEAN di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Media Center* ini dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Sekretariat Negara.

"Jadi ada banyak *event* juga sebelum KTT ASEAN di Labuan Bajo dan undangan peliputan nanti akan dilakukan oleh sektor atau kementerian yang menyelenggarakan. Teman-teman nanti akan mendapatkan undangannya dan kemudian juga mereka akan membuat pers rilis untuk teman-teman yang barangkali tidak sempat meliput langsung," tukas Dirjen IKP Usman Kansong.

Pemerintah juga akan membentuk redaksi bersama untuk memproduksi informasi agar bisa digunakan untuk mempermudah kerja jurnalis peliput KTT ASEAN 2023.

Menkominfo Tinjau Kesiapan Layanan Media

Guna memastikan kesiapan layanan fasilitas untuk media, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko bersama



para pimpinan media nasional dan lokal mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (2/5/2023).

Kunjungan tersebut untuk memastikan kesiapan beberapa tempat yang menjadi lokasi gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023, di antaranya Hotel Meruorah sebagai tempat *retreat*, Hotel Ayana sebagai lokasi makan malam para Kepala Negara ASEAN, dan *Media Center* untuk mendukung komunikasi publik yang berlokasi di hotel Bintang Flores.

Ada 20 pimpinan media massa nasional, 8 media lokal NTT serta 17 wartawan nasional dan 9 wartawan lokal yang turut bersama Menkominfo dan Kepala Staf Kepresidenan. Secara keseluruhan kunjungan tersebut sebagai upaya melihat bagaimana perhelatan internasional 9 hingga 11 Mei 2023 siap digelar, terutama layanan media.

"Kita ingin standar layanan media di KTT ASEAN setara dengan KTT 20 di Bali tahun lalu, tentu disesuaikan dengan kondisi Labuan Bajo," kata Johnny G. Plate yang juga Penanggung Jawab Komunikasi dan Kehumasan dalam Kapanitayan Nasional KTT ke-42 ASEAN.

Media center yang disediakan bagi jurnalis memiliki berbagai fasilitas untuk memfasilitasi kerja para peliput KTT ASEAN, antara lain ruang kerja, ruang jumpa pers, studio mini, serta jaringan internet.

Siaran pers, foto, dan video dari lokasi KTT didistribusikan ke *media center* untuk menjadi bahan berita jurnalis. Tercatat 319 jurnalis yang terdaftar dan terakreditasi. Terdiri dari jurnalis lokal, nasional, regional ASEAN, dan global.

"*Media center* beroperasi mulai 6 Mei sampai 12 Mei dilengkapi jaringan internet dari fiber optik, satelit dan *base transceiver station* berkapasitas dan berkecepatan tinggi baik 4G maupun 5G," kata Johnny Plate.

Menkominfo berharap media meliput dan memberitakan substansi pertemuan maupun sisi-sisi lain gelaran KTT ke-42 ASEAN 2023. "Kesuksesan KTT ASEAN turut ditentukan bagaimana media mentransmisikan informasi tentang KTT ASEAN tersebut," kata Menteri Johnny.

Sementara Moeldoko yang juga anggota Tim Komunikasi dan Humas KTT ke-42 ASEAN 2023 menambahkan jika Indonesia telah mempunyai pengalaman dalam mengelola komunikasi publik dan *media center* saat pelaksanaan KTT G20. "Nah, pengalaman itu menjadi referensi untuk penyelenggaraan KTT ASEAN sekarang," tuturnya.



Kesuksesan KTT ASEAN turut ditentukan bagaimana media mentransmisikan informasi tentang KTT ASEAN tersebut

Infrastruktur digital menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang sukses penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan kesiapan akses telekomunikasi dan jaringan internet berkualitas, bekerja sama dengan penyelenggara layanan telekomunikasi, terutama PT Telkom Indonesia.

"Kami terus menyiapkan kualitas jaringan internet yang mencukupi sebagai kebutuhan siaran selama perhelatan berlangsung. Termasuk jaringan seluler maupun *fixed network*-nya. Agar *bandwidth* yang cukup, sehingga *upload* dan *download* data nanti bisa dilakukan dengan baik dan memadai," ungkap Johnny G. Plate kepada jurnalis peserta *media gathering* persiapan KTT ke-42 ASEAN di Kantor *Network Operation Center* PT Telkom Indonesia, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (3/5/2023).

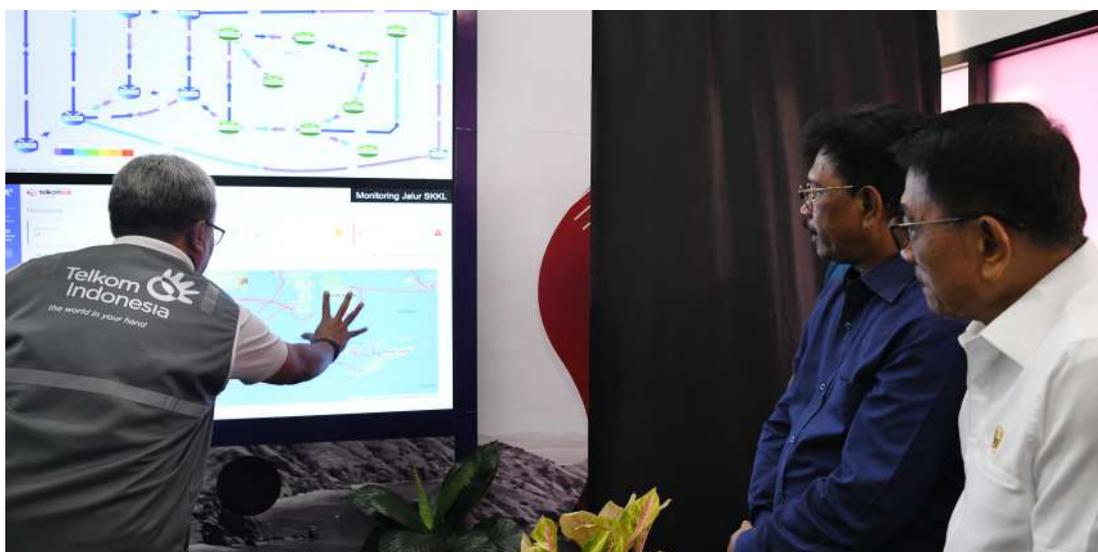
"Walaupun Labuan Bajo ini wilayah baru dikembangkan Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi meski baru, ini dipilih untuk menunjukkan masuk di etalase internasional. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa," tambahnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo dan PT Telkom Indonesia juga menyiapkan jaringan *back-up* agar menjamin jaringan internet tetap optimal selama KTT ke-42 ASEAN.

"Sudah hampir lengkap atau sebentar lagi rampung 100 persen siap. (Jaringan Sistem Komunikasi Kabel Laut, red) perlu kita perhatikan betul-betul agar KTT ASEAN ke-42 ini berjalan lancar dan masyarakat kita mendapat manfaatnya," tandasnya.

Selain pemantauan yang dilakukan dari NOC PT Telkom Indonesia di Manggarai Barat, Kementerian Kominfo juga menyiapkan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika yang ada di Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang.

“Walaupun Labuan Bajo ini wilayah baru dikembangkan Bapak Presiden Joko Widodo, tetapi meski baru, ini dipilih untuk menunjukkan masuk di etalase internasional.



"Mereka mengawasi spektrum frekuensi selama penyelenggaraan KTT ASEAN. PT Telkom pun sudah menyiapkan pemantauan agar tidak terjadi *interference* spektrum frekuensi. Saya berharap tentu melalui *Network Operation Center* di sini bisa melakukan monitoring dengan baik," ungkapnya.

Senada dengan Menkominfo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan jaringan telekomunikasi yang optimal merupakan jantungnya kesuksesan KTT ke-42 ASEAN 2023.

"Publik sekarang menunggu dengan seksama apa yang dihasilkan dari KTT ini dan itu bisa di-*deliver* teman-teman media ke publik sebagai jembatan, maka kuncinya ada di sini (kualitas jaringan operator)," tandasnya.

Berkaca dari penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada November 2022, Moeldoko menyatakan sejauh ini semua persiapan layanan telekomunikasi berjalan dengan baik.

"Segala hal teknis berkaitan kualitas jaringan harus dirinci dengan baik kemungkinan-kemungkinan yang mengganggu," ujarnya.

Tindak Lanjut KTT ASEAN, Indonesia-Vietnam Jajaki Kerja Sama Sektor Digital

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Indonesia telah sukses dilaksanakan pada 10-11 Mei 2023. Indonesia, sebagai penyelenggara terlaksananya KTT ASEAN 2023, berhasil mendorong terciptanya sejumlah kesepakatan dan kerja sama negara-negara anggota ASEAN. .

"Karena memang ASEAN ini adalah satu keluarga, ikatannya sangat kuat. Kesatuannya sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama, menjadikan ASEAN *epicentrum of growth* dan kawasan damai stabil dan sejahtera," ujar Presiden RI Joko Widodo.

Pernyataan Pers dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) selaku pemegang Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 menutup rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 yang berlangsung 10-11 Mei 2023. Destinasi prioritas pariwisata nasional di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi tuan rumah dari pertemuan bersejarah pemimpin Asia Tenggara tersebut.

Kesimpulan utama dari hasil akhir KTT ASEAN 2023 para pimpinan negara Asia Tenggara menyepakati segala keputusan yang dibentuk harus mengutamakan kepentingan rakyat di kawasan.

"Adapun beberapa kesimpulan dari KTT ini yang pertama, hal yang menyentuh kepentingan rakyat menjadi perhatian penting para *leaders*, termasuk perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan manusia," jelas Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers usai KTT ASEAN 2023 di *Media Center*, Labuan Bajo, Kamis (11/5/2023).

“Kesimpulan utama dari hasil akhir KTT ASEAN 2023 para pimpinan negara Asia Tenggara menyepakati segala keputusan yang dibentuk harus mengutamakan kepentingan rakyat di kawasan.”



Dengan semangat tersebut, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin di kawasan ASEAN untuk menindak tegas pelaku utama kejahatan khususnya yang dialami pekerja migran, nelayan migran, dan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Poin kedua, yang menjadi isu besar bagi ASEAN saat ini adalah terkait Myanmar. Bagi para pemimpin ASEAN, pencideraan terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa ditoleransi dan 5 *Point Consensus* (5PC) memandatkan ASEAN harus melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dalam hal ini, Kepala Negara mengatakan bahwa ASEAN harus memegang kuat nilai inklusivitas karena kredibilitas ASEAN saat ini sedang dipertaruhkan. Untuk itu, Indonesia siap untuk melakukan dialog dengan berbagai pihak di Myanmar termasuk junta militer dan seluruh *stakeholders* untuk kepentingan kemanusiaan.

Namun demikian, Presiden RI menegaskan bahwa pendekatan terhadap pihak Myanmar bukan berarti pengakuan. "Saya tegaskan bahwa *engagement* bukan *recognition*. Melakukan pendekatan bukan berarti memberikan pengakuan," tegasnya.

Poin ketiga, para pemimpin juga menyepakati penguatan kerja sama ekonomi, salah satunya pembentukan ekosistem mobil listrik. ASEAN sepakat untuk membangun ekosistem mobil listrik dan menjadi bagian penting dari rantai pasok dunia sehingga hilirisasi industri menjadi kunci.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan alasan mengajak para pemimpin ASEAN berlayar menikmati senja di Labuan Bajo. Presiden mengatakan bahwa ASEAN merupakan satu keluarga.

Presiden mengatakan bahwa ASEAN merupakan satu keluarga.

Di sela KTT ke-42, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI), Johnny G Plate, usai menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi dan Komunikasi Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/5/2023).

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam akan menyusun *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara di sektor digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan payung hukum itu diharapkan akan memperkuat kerja sama dalam infrastruktur digital dan pemanfaatan ruang digital antarnegara.

“Indonesia dan Vietnam selama ini belum mempunyai payung kerja sama, sehingga tadi kami sepakati untuk membuat satu payung kerja sama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Indonesia dan Vietnam yang berhubungan dengan pengembangan infrastruktur digital dan ruang digital” jelasnya usai pertemuan bilateral dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/05/2023).

Selain pengembangan infrastruktur digital, Indonesia-Vietnam juga akan menyusun MoU untuk pemanfaatan ruang digital untuk digital ekonomi hingga upaya bersama dalam menangani *cyber security* serta pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi.

“Ini penting sekali kita lakukan bersama-sama agar ruang digital itu bisa bermanfaat bagi masyarakat kita secara maksimal. *Combat fake news disinformation* tentu sejalan dengan hukum dan aturan atau yang disebut dengan *lawful interceptions* dan *lawful taking down*. Itu yang kami diskusikan,” tandas Menteri Johnny.

Dalam pertemuan itu, Menkominfo dengan Menteri Digital Vietnam berbagi pengalaman mengenai pengembangan infrastruktur digital.

“Saya bersama Menteri Digital Vietnam Bapak Nguyen Manh Hung, mendiskusikan serta sharing pengalaman dan informasi terkait

dengan pengembangan ICT infrastruktur baik itu di Indonesia maupun di Vietnam,” tutur Menkominfo.

Menurut Menteri Johnny, bersama Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung juga mendiskusikan arti penting penanganan ruang digital yang sehat agar bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa dari kedua negara.

“Tidak saja secara bilateral, tapi juga kerjasama di dalam ruang digital dan infrastruktur digital di kawasan ASEAN. Karena ini satu kawasan yang besar dimana menjadi *growth area* yang harus kita manfaatkan digitalisasinya untuk kepentingan pembangunan masyarakat,” jelasnya.





Menkominfo menyatakan salah satu peluang yang tengah dibahas berkaitan dengan penegakan hukum saat mendeteksi aktivitas ilegal dan tindakan kriminal dalam ruang digital. Salah satunya berkaitan dengan konten promosi digital berisi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Karena apa? (aktivitas) di *online* ini juga digunakan untuk promosi TPPO. Itu juga perlu kita perhatikan bersama-sama. Kita sudah mempunyai sistem, yang perlu sekarang bagaimana koordinasi dan kolaborasi antara kedua kementerian Vietnam dan Indonesia dan kerja sama multilateral dan kerjasama bilateral di negara-negara ASEAN,” jelasnya usai dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/05/2023).

Menurut Menteri Johnny, Indonesia dan Vietnam mempunyai perspektif yang sama dalam pemanfaatan ruang digital dan digitalisasi. Menkominfo menyatakan kedua negara sama-sama memiliki komitmen menjaga ruang digital.

“Di Vietnam juga ada peralatan yang berkaitan dengan *surveillance system* dan *crawling system* yang memantau ruang digital, apakah ada tindakan-tindakan ilegal dan kriminal di dalam ruang digital. Vietnam sudah punya, Indonesia juga sudah punya saat ini,” ujarnya.

Menteri Johnny menilai *surveillance system* yang telah dimiliki kedua negara semakin mempermudah hubungan kerja sama dengan

menggandeng *platform* digital baik yang beroperasi di Indonesia maupun Vietnam.

“Yang perlu setelah di dalam ruang digital *surveillance system* ditemukan, dikoordinasikan baik dengan *platform* digital untuk *take down* dan dengan aparat penegak hukum untuk tindak lanjutnya. Saya kira selama ini sudah berjalan dengan baik, kalau itu tidak berjalan dengan baik kita nggak tahu TPPO di Myanmar misalnya yang terjadi saat ini. Nah, yang perlu sekarang justru meningkatkan kerja sama yang lebih efisien dan efektif,” tuturnya.

Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas pertemuan tersebut. Menurutnya, Vietnam akan menindaklanjuti kesepakatan MoU tersebut yang rencananya dibahas pada bulan September 2023 nanti.

“Pada bulan September ini, kita sedang dalam MoU antara kedua kementerian (Kementerian Kominfo RI dan Kementerian Digital Vietnam) untuk membuat perjanjian kerja sama,” jelasnya.

Menteri Nguyen Manh Hung menegaskan tindak lanjut dari hubungan kerja sama yang digagas bersama Menkominfo Johnny G. Plate itu akan menjadi daftar kemitraan terbaru antar kedua negara.

“Jadi saya pikir, kita memiliki banyak kesamaan untuk bekerja sama dengan mitra kami Indonesia, khususnya Kementerian Kominfo,” tandasnya.

Otto Toto Sugiri

Bill Gates-nya Indonesia



Hidup adalah perjalanan yang sarat dengan kondisi naik turun, dimana tokoh inspiratif Otto Toto Sugiri adalah bukti nyata bahwa ketekunan dan rasa pantang menyerah bisa membawa seseorang dari titik yang penuh kesulitan menuju puncak kesuksesan yang gemilang. Dalam perjalanan hidupnya, Otto Toto Sugiri telah melewati berbagai kisah yang tak hanya soal keberhasilan melainkan juga kegagalan yang sukses memberikan inspirasi bagi banyak orang.

Mulai dari Jerman ke Indonesia

Otto Toto Sugiri lahir dengan semangat petualang di dalam dirinya. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di Jerman, dia kembali ke tanah air Indonesia. Namun, perjalanan hidupnya segera dipenuhi dengan cobaan ketika ibunya jatuh sakit. Keinginan untuk merawat ibunya dengan penuh kasih sayang memimpinkannya untuk menunda karir profesionalnya yang sedang berkembang di luar negeri.

Mencari Jalan di Dunia Teknologi

Setelah kembali ke Indonesia, Otto Toto Sugiri menemukan kenyataan tak semudah yang direncanakan. Kala itu, ia sangat kesulitan menemukan pekerjaan di Indonesia, terlebih pekerjaan yang ia cari adalah pekerjaan di bidang teknologi. Hal ini tentu membuatnya merasa frustrasi. Namun, tekadnya untuk mencapai kesuksesan tak pernah kendur.

Di tengah masa sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, hadir lah seorang teman yang mengajaknya untuk bekerja di Bank Bali, yang mana kemudian menjadi tempat ia mendapatkan pengalaman berharga selama enam tahun. Dan tempat ini menjadi batu loncatan yang penting dalam perjalanan karir Otto Toto Sugiri.

Keinginan kuat untuk memulai bisnisnya sendiri akhirnya membawa Otto Toto Sugiri pada sebuah ide yang besar: mendirikan Sigma Cipta Caraka. Sigma Cipta Caraka bergerak di bidang teknologi informasi yang mengkhususkan diri pada solusi perbankan yang pada masanya menjadi satu-satunya yang paling bisa diandalkan dalam bidang tersebut. Dalam waktu singkat, perusahaan ini pun mencapai kesuksesan besar dan berhasil bertahan tanpa terilit hutang.

Tahun 2008 menjadi puncak keberhasilan Otto Toto Sugiri yaitu ketika ia berhasil menjual 80% saham Sigma Cipta Caraka kepada Telkom senilai US\$ 35 juta. Keputusan ini memperkuat posisi Sigma Cipta Caraka dan membawa keuntungan yang sangat besar.

Dua tahun kemudian, di tahun 2010, Otto Toto Sugiri memutuskan untuk menjual seluruh saham Sigma Cipta Caraka. Namun walaupun ia telah melepaskan perusahaan yang telah ia bangun dengan sangat baik tersebut, tak menghentikan langkah Otto Toto Sugiri untuk terus melesat maju.

“...ia berhasil menjual 80% saham Sigma Cipta Caraka kepada Telkom senilai US\$ 35 juta

Mendirikan DCI Indonesia

Tahun 2011 menjadi salah satu tahun bersejarah dalam hidup Otto Toto Sugiri. Pada tahun ini, ia mendirikan Data Center Indonesia atau yang biasa disebut dengan DCI Indonesia. Perusahaan yang berfokus pada penyediaan layanan pusat data, yang kemudian dengan cepat tumbuh menjadi salah satu pemimpin di industri tersebut di Indonesia.

Prestasi besar dari seorang Otto Toto Sugiri tidak hanya terjadi di pasar dalam negeri. Kualitas layanan terbaik yang diberikannya melalui DCI Indonesia telah menjadikan klien-klien besar dari berbagai negara, mulai dari Asia hingga Amerika

Pencapaian

2014

DCI mendapat sertifikat tier IV, sebuah klasifikasi tertinggi untuk industri pusat data global.

2021

Forbes mencatat Toto sebagai orang terkaya no. 19 dari 50 orang terkaya di Indonesia. Kekayaan Toto mencapai Rp 35,62 triliun.



Dokumentasi: AHMAD ZAMRONI/HKV FOR FORBES ASIA

jatuh hati padanya. Keberhasilan ini kemudian menjadikannya mendapat julukan sebagai "Bill Gates-nya Indonesia."

Berkat keberhasilannya membangun DCI Indonesia, Otto Toto Sugiri berhasil masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes, yang menempati urutan ke 23 orang terkaya di negeri ini. Kesuksesannya adalah hasil dari kerja keras serta ketekunan untuk bekerja dan berinovasi serta keberaniannya mengambil risiko. Kisah hidupnya menjadi contoh nyata bahwa ketekunan dan tekad untuk terus maju bisa mengubah takdir seseorang.

Pemilihan Umum Serentak 2024

Kolaborasi Ekosistem Demokrasi
yang Berkualitas



Indonesia, sebuah negara dengan sejarah panjang dan keragaman budaya yang kaya, akan menghadapi salah satu momen penting dalam perjalanan demokrasinya: Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Tanggal yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemungutan suara adalah Rabu, 14 Februari 2024, yang telah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin, 14 Februari 2022.



Pemilu ini akan mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tanggal bersejarah ini akan menjadi tonggak yang kuat dalam perkembangan demokrasi Indonesia, memungkinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan arah politik, sosial dan ekonomi negara ini.

Pemilu serentak tahun 2024 juga mencakup pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan serentak pada Rabu, 27 November 2024. Pilkada ini melibatkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di berbagai wilayah Indonesia. Pilkada serentak bukan hanya tentang memilih pemimpin lokal, tetapi juga merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas politik di tingkat daerah dan mempengaruhi perkembangan serta kebijakan yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Dalam hal ini, Pemilu 2024 di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan proses demokratis yang transparan, adil, demokratis dan jujur, serta memastikan bahwa hak suara dan partisipasi seluruh masyarakat dihormati.

“ **...Pemilu 2024 di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan proses demokratis yang transparan, adil, demokratis dan jujur** ”

Partisipasi yang kuat dan pemilihan yang adil dalam Pemilu 2024 adalah kunci menjaga stabilitas politik, meningkatkan demokrasi dan memperkuat representasi masyarakat. Proses Pemilu harus transparan dan memenuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi, termasuk hak suara yang bebas dan rahasia, pemungutan suara yang adil, serta penghitungan suara yang jujur. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu ini dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan lancar.

Dalam rangka sosialisasi Pemilu Serentak 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan media gathering bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dengan mengusung tema “Media Gathering Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Hajar Serangan Fajar” pada awal Juli lalu. Dalam upaya memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD, melalui pidatonya menekankan pentingnya kolaborasi ekosistem dalam mewujudkan sistem demokrasi yang ideal.

"Sekarang ini Pemilu sudah kurang dari tujuh bulan. Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilu sehat, berintegritas, dan berkualitas. Hal tersebut harus dibangun bersama-sama untuk Pemilu tahun 2024, yang akan menentukan masa depan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Menteri Mahfud MD juga mengajak instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum dan media untuk berkolaborasi demi menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan wakil yang tepat. "Jangan sampai ada intervensi di antara aparat penyelenggara dan tumpang tindih.

Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat," ajaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan bahwa upaya KPK bersama penyelenggara dan kontestan Pemilu bertujuan meningkatkan integritas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. "Pemilu yang sehat memiliki kriteria seperti penyelenggara pemilu yang berkualitas, calon, dan pemilih yang berintegritas. Kami di KPK, misalnya, berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU tentang bagaimana mereka dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas," jelasnya.

“ Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilu sehat, berintegritas, dan berkualitas.





Kominfo memiliki tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan mendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024

Integritas menjadi kata kunci dalam menjaga Pemilu yang demokratis. Komitmen dari penyelenggara dan partai politik sebagai kontestan perlu diimbangi dengan komitmen dari masyarakat Indonesia sebagai pemilih. "Penyelenggara berintegritas, para calon berintegritas, dan pemilihnya berintegritas. Kami mengajak masyarakat untuk semakin sadar dan tidak terlibat dalam praktik politik uang yang dapat mengganggu integritas pemilu," tegasnya.

Untuk menciptakan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan dan demokratis, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo bekerja sama dengan KPK dalam sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat. "Kominfo memiliki tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dan mendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. KPK juga punya kepentingan

agar pemilu berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang. Karena kepentingan yang sama bertemu, maka kita bersepakat untuk bekerja sama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu," jelasnya.

Dengan berbagai persiapan dan komitmen yang telah ditegaskan oleh pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu dan berbagai elemen masyarakat, Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 akan menjadi tonggak bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Proses ini bukan hanya sekadar pesta demokrasi, tetapi juga sebuah refleksi dari kedewasaan politik dan partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah masa depan bangsa. Dalam konteks yang semakin kompleks dan tuntutan yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, menjaga integritas pemilu menjadi tantangan besar, namun juga peluang untuk memperkuat dasar demokrasi di Indonesia.



Pemilu 2024 akan menjadi ujian bagi sistem demokrasi di Indonesia, dengan harapan bahwa semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, partai politik, hingga masyarakat umum, akan mengambil peran aktif dalam memastikan pemilihan yang jujur dan berintegritas. Dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan, penting untuk memahami bahwa pemilu adalah tentang lebih dari sekadar memilih pemimpin; ini adalah tentang membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, melalui proses pemilihan yang adil dan transparan, serta dengan partisipasi yang aktif dari seluruh lapisan

masyarakat, Pemilu 2024 akan menjadi landasan kuat untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar demokrasi. Semua ini tidak hanya akan membentuk masa depan politik Indonesia, tetapi juga membawa dampak langsung pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Dengan kata lain, Pemilu 2024 adalah panggung utama bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini adalah contoh nyata dari demokrasi yang matang, adil dan bermartabat, yang memberikan suara kepada setiap warganya untuk menentukan takdirnya sendiri.



...Pemilu 2024 akan menjadi landasan kuat untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Kolaborasi Kominfo dan TNI

Sinergi Pertahanan Kedaulatan Bangsa



Tantangan dunia digital semakin besar dan berdampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Konten-konten negatif terus bermunculan di tengah masyarakat. Begitu pula kejahatan di ruang digital yang meningkat. Hoaks, penipuan online, perjudian online, ujaran kebencian, dan sebagainya, telah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Memerangi konten negatif sudah menjadi kewajiban semua pihak sebagai warga negara, terlebih bagi seorang anggota TNI dan kementerian Kominfo dengan kapasitas dan kewenangan yang dimilikinya dengan cara mengisi ruang digital dengan konten-konten positif dan mendidik.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut Kementerian Kominfo dan TNI menyadari pentingnya memiliki kecakapan digital. Dengan dasar tersebut dibentuklah berbagai kolaborasi antara Kementerian Kominfo dan TNI dalam sektor digital, salah satunya adalah program Literasi Digital Sektor Pemerintahan yang diluncurkan pada bulan Juni 2023.

Dalam pidato pembukaannya, Panglima TNI Yudo Margono menyatakan bahwa penggunaan perangkat *handphone* prajurit TNI memang perlu diawasi karena masih perlunya pemahaman lebih secara menyeluruh tentang bagaimana penggunaan konten positif seharusnya disampaikan di ruang digital.

Panglima TNI melanjutkan bahwa angkatan senjata dimanapun berada selalu menganut prinsip kerahasiaan. Hal tersebut yang ingin dijadikan sebagai landasan bagi TNI untuk mengangkat konten positif dan membentuk citra yang baik serta memilah konten yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

“ Literasi digital adalah kerja besar yang memerlukan sinergi semua pihak, dan menjadi program nasional





Menjadi Aktor Perekat Bangsa

Literasi digital adalah kerja besar yang memerlukan sinergi semua pihak, dan menjadi program nasional yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2021. Dimana segenap komponen bangsa harus disiapkan untuk kebutuhan sumber daya manusia bertalenta digital guna menjaga daya saing bangsa.

Panglima TNI menambahkan bahwa prajurit TNI sebagai alat negara dan bagian dari komponen bangsa wajib mendukung program tersebut dan mengambil peran dalam literasi digital dengan harapan bisa menjadi aktor perekat bangsa di ruang digital.

Diharapkan melalui kolaborasi ini dapat menghasilkan TNI yang bijak berlandaskan empat pilar digital yaitu *Digital Skills* atau Kecakapan Digital; *Digital Safety* atau Keamanan Digital; *Digital Culture* atau Budaya Digital; dan *Digital Ethics* atau Etika Digital.

Dengan diadakannya kolaborasi ini Panglima TNI berharap kedepannya tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, menyebarkan hoaks, membocorkan rahasia negara, dan menyebarkan konten yang bertentangan dengan fungsi TNI sebagai aparat negara.

“...kedepannya tidak ada lagi prajurit TNI yang buta digital, menyebarkan hoaks, membocorkan rahasia negara, dan menyebarkan konten yang bertentangan dengan fungsi TNI

Potensi ancaman digital bagi bangsa saat ini adalah pemilihan umum serentak tahun 2024. Dunia maya akan menjadi ajang kampanye yang dapat memicu polarisasi dan perpecahan bangsa. Sehingga untuk meredam potensi gejolak yang terjadi dibutuhkan kecakapan digital dari berbagai pihak.

Dalam sambutannya, Plt. Menteri Kominfo Mahfud MD menyampaikan bahwa dalam beberapa dekade ke belakang terdapat istilah-istilah yang menjadi isu hangat, dimulai dari era tahun 90-an dimana istilah globalisasi menjadi topik yang banyak dibicarakan yang menyangkut persoalan tentang demokratisasi dan hak asasi manusia. Juga isu kelestarian alam dan pasar bebas. Saat itu sudah terjadi masifikasi teknologi informasi, sehingga seluruh informasi yang berkembang pada era tersebut diperkuat dan diperluas secara cepat.

“ Literasi digital adalah kerja besar yang memerlukan sinergi semua pihak, dan menjadi program nasional



© 2023 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Kemudian pada era tahun 2000 masuk ke masa isu millennial, yaitu *Millennial Development Goals* (MDG), yaitu 8 program yang harus diikuti oleh negara-negara di dunia. Setelahnya, pada 2015 masuk 17 program *Sustainable Development Goals* (SDG), yaitu isu pembangunan inklusif sedunia yang harus diikuti oleh semua negara.

Dan saat ini muncul industri 4.0 dan dengan sangat cepat masuk ke 5.0. Karena kehidupan masyarakat dunia sudah didominasi kehidupan digital. Hampir tidak ada negara yang ingin maju yang tidak ikut dalam arus perkembangan teknologi dan informasi melalui digital, sehingga muncul istilah “*digital dictatorship*” yang menggambarkan bahwa kehidupan saat ini

sudah dikendalikan oleh digital. Bahkan pada beberapa kasus terkadang disesatkan digital seperti karena hoaks. Ada juga perubahan serba cepat yang disebut sebagai *disrupsi*. Dan yang terbaru munculnya *artificial intelligence*.

Hal-hal tersebut yang menjadikan literasi digital sangat penting bagi bangsa ini jika ingin maju. Dimana angka literasi digital Indonesia masih rendah, sebagaimana yang dirilis dalam *World Digital Competitiveness Ranking* oleh Institute for Management Development, bahwa Indonesia hanya berada pada urutan ke 51 dari 63 negara.

Yang dimaksud dengan literasi disini adalah paham, paham mana yang baik dan tidak, bukan hanya sekedar menggunakan. Jadi meskipun pengguna digital di Indonesia tinggi, namun indeks literasinya rendah.

Perkembangan di era digital menimbulkan jenis-jenis ancaman baru bagi kedaulatan bangsa yang harus diwaspadai semua pihak terutama TNI dalam menjalankan tugasnya menjaga pertahanan negara dari berbagai ancaman.



Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serangan siber mencakup serangan *Distributed Denial-of-Service* (DDoS), dimana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan *host* yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Lalu serangan seperti pencurian data, dan sabotase sistem.

Kemudian propaganda juga menjadi ancaman nasional, dimana propaganda yang dilakukan melalui media sosial menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa.

"Peran penting TNI dalam pemilu tahun 2024 sudah di depan mata, sehingga diharapkan netralitas prajurit TNI dan keluarga besar TNI untuk menjadi pondasi utama dalam melancarkan proses pemilu dan memastikan pemilu aman," tutur Plt. Menteri Kominfo Mahfud MD dalam pidato pembukaan acara Literasi Digital Sektor Pemerintahan.

Melalui kolaborasi ini dan kolaborasi Kominfo dengan TNI lainnya, masyarakat Indonesia berharap ketahanan siber Indonesia semakin kuat dan digdaya dalam menjaga ekosistem ruang digital yang positif.

Hari Lahir Pancasila Meresapi Kembali 5 Pilar Kebangsaan

Hari Lahir Pancasila yang jatuh tepat pada tanggal 1 Juni 2023 menjadi momen penting yang harus dirayakan oleh bangsa Indonesia, tak terkecuali generasi muda yang masih menempuh pendidikan dalam rangka mengisi kemerdekaan.

Dalam perayaannya, Hari Lahir Pancasila dimaknai sebagai ajang bagi bangsa Indonesia meresapi kembali nilai-nilai kebangsaan nan luhur yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa melalui 5 poin penting dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.



Pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila yang terjadi tanggal 1 Juni setiap tahunnya dilakukan mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga instansi pemerintahan. Penanaman nilai-nilai Pancasila penting untuk dilakukan sejak dini untuk memperkuat nilai kebangsaan setiap warga negara Indonesia. Kanak-kanak dianggap fase krusial mengingat pada masa ini merupakan masa tumbuh kembang mereka dimana nilai-nilai sosial dipelajari hingga terbentuk menjadi pondasi kepribadian dalam diri mereka.



Melalui momen ini, sebagai bagian dari bangsa Indonesia diharapkan dapat memahami secara lebih mendalam esensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan bagaimana nilai-nilai ini mengukuhkan identitas nasional. Upacara tersebut juga menjadi wahana untuk merangsang diskusi dan refleksi mengenai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dalam mempertahankan integritas budaya dan kebangsaan di era globalisasi saat ini.



Maju dan Mendunia dengan Menjalin Kolaborasi

Beberapa tahun belakangan kolaborasi menjadi isu atau istilah yang semakin sering dibahas pada berbagai sektor di tengah disrupsi teknologi digital. Kolaborasi telah menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong kemajuan dan perkembangan di berbagai ranah kehidupan. Dalam era globalisasi seperti saat ini, kolaborasi bukan hanya sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Pentingnya kolaborasi dapat dirangkum dalam beberapa poin utama:

01 Mengatasi Tantangan yang Kompleks

Kolaborasi memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian mereka untuk mengatasi masalah yang terlalu besar atau kompleks untuk diselesaikan secara individual.

02 Mendorong Inovasi dan Efisiensi

Melalui pertukaran ide, pengalaman dan penggabungan sumber daya, kolaborasi memacu inovasi dan peningkatan efisiensi dalam mencapai suatu hasil inovatif. Dalam lingkungan yang kolaboratif, ide-ide segar sering kali muncul dan diwujudkan menjadi solusi yang revolusioner dengan lebih efisien dari berbagai sisi.

03 Mengatasi Tantangan yang Kompleks

Kolaborasi memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk menggabungkan pengetahuan, sumber daya, dan keahlian mereka untuk mengatasi masalah yang terlalu besar atau kompleks untuk diselesaikan secara individual.

Kolaborasi Pada Berbagai Tingkat Tatanan Bernegara

Sebagai warga negara Indonesia, bentuk kolaborasi dapat kita temui pada berbagai aktivitas berkehidupan, mulai dari kolaborasi antar pelaku umkm, antar pelaku bisnis, antar instansi pemerintah, hingga kolaborasi antar negara.

Kolaborasi yang berlangsung pada berbagai tingkat tersebut saling mendukung meskipun secara tidak langsung, namun saling mengokohkan fondasi bangsa ini. Sebagai contoh, kolaborasi antar pelaku umkm atau *startup* telah banyak menghasilkan banyak inovasi dan lapangan pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah ada, contohnya seperti munculnya ojek *online*. Dimana hal ini telah memberi dampak yang signifikan pada masyarakat.

Kolaborasi pada tingkatan lainnya seperti pada instansi pemerintahan juga memiliki dampak yang sangat vital. Sebagaimana dinyatakan dalam laporan *World Government Summit* bahwa pengelolaan pemerintahan di masa depan dilakukan bersama masyarakat/*stakeholder* dalam bentuk kolaborasi dengan prinsip saling mempercayai (Suarez & Abdallah, 2019).

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kolaborasi adalah masa kini dan masa masa depan organisasi pemerintahan. Kolaborasi di tengah keterbukaan informasi dapat menguatkan fungsi-fungsi pemerintahan. Selanjutnya, kolaborasi antar organ-organ pemerintah juga dapat mempromosikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan.

Salah satu contohnya seperti kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan TNI dalam memperkuat literasi digital pada sektor pemerintahan. Dimana dua instansi dengan keahlian dan lingkup masing-masing saling melengkapi satu sama lain sehingga menghasilkan output keamanan siber yang saling mendukung antara *online* dan *offline*.



Kolaborasi untuk Mendunia

Pada tingkatan yang lebih besar seperti kolaborasi antar negara, tantangan untuk menyamakan visi dan bentuk kolaborasi semakin tinggi. Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan dan memimpin pada *event* dunia seperti G20 dan KTT ASEAN ke-42 merupakan perwujudan pentingnya dan kemampuan bangsa kita dalam menjalin kolaborasi pada tingkatan dunia.

Pencapaian ini tidak serta-merta akan bertahan begitu saja, namun harus terus dijaga dengan memupuk pola interaksi dalam berkolaborasi sejak dini, dari masa sekolah hingga dukungan pemerintah untuk *startup* atau umkm melalui berbagai kegiatan.

Tentunya kita ingin Indonesia bisa semakin maju dan kembali menjadi pemimpin bahkan pionir pada tingkatan global. Yang dapat kita lakukan sebagai warga negara adalah turut berperan aktif dalam menginisiasi kolaborasi dalam lingkungan terdekat dan terkecil yang dapat dijamah.

Sehingga semangat kolaborasi dapat terus terjaga dan terus terasah untuk talenta muda dan mendunia.

Menuju Event Dunia

Meninjau Kesiapan Infrastruktur Digital KTT ASEAN ke-42





Ajang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang diselenggarakan di Labuan Bajo menjadi salah satu *event* internasional terbesar yang diselenggarakan di Indonesia. Dengan Indonesia sebagai negara ketua pelaksana di tahun 2023 ini, menjadikan sinergi dan peran dari setiap K/L menjadi teramat penting.

Kementerian Kominfo turut mendukung persiapan penyelenggaraan KTT dalam lingkup persiapan regulasi dan infrastruktur digital yang memadai sesuai standar internasional.

Media center yang ditujukan sebagai penunjang kegiatan pers menjadi salah satu persiapan yang menjadi prioritas Kementerian Kominfo.

Meninjau Media Center

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa (02/05/2023). Rombongan mengunjungi lokasi pelaksanaan KTT ASEAN di Hotel Meruorah, tempat makan malam para kepala negara di Hotel Ayana, dan media center di Hotel Bintang Flores.

Kunjungan diikuti 20 pimpinan media nasional dan 8 pimpinan media lokal NTT serta 17 wartawan nasional dan 9 wartawan lokal. Kunjungan bertujuan mengecek persiapan KTT ASEAN di Labuan Bajo 10 s.d. 11 Mei 2023, terutama layanan media.

"Kita ingin standar layanan media di KTT ASEAN setara dengan KTT 20 di Bali tahun lalu, tentu disesuaikan dengan kondisi Labuan Bajo," ungkap Menteri Johnny G. Plate yang juga Penanggung Jawab Komunikasi dan Kehumasan dalam kepanitiaan nasional KTT ASEAN ke-42 di Indonesia.





Media center memiliki berbagai fasilitas untuk memfasilitasi kerja jurnalis peliput KTT ASEAN antara lain ruang kerja, ruang jumpa pers, studio mini, serta jaringan internet.

Siaran pers, foto, dan video dari lokasi KTT didistribusikan ke *media center* untuk menjadi bahan berita jurnalis yang bekerja di *media center* tersebut. Tercatat 319 jurnalis yang teregistrasi dan terakreditasi, terdiri dari jurnalis lokal, nasional, regional ASEAN, dan global.



Meninjau NOC Telkom Labuan Bajo

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau Kantor *Network Operation Center* PT. Telkom Indonesia, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (03/05/2023). Kunjungan itu guna memastikan akses telekomunikasi dan jaringan internet berkualitas selama KTT ke-42 ASEAN.

Kunjungan Menkominfo Johnny G. Plate ke Kantor NOC Labuan Bajo, Manggarai Barat merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau dan memastikan kesiapan infrastruktur digital dan layanan media selama KTT ke-42 ASEAN. Dalam kunjungan itu hadir Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong; CITO PT. Telkom Indonesia, Erlan Widjanarko; serta Ketua Gugus Kerja ASEAN Summit PT. Telkom Indonesia, Syaifudin.





KOMINFO

SELAMAT ULANG TAHUN

BAPAK
IR. H. JOKO WIDODO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

21 JUNI 2023



Jadi Bahasan KTT ke-42 ASEAN, Menteri Johnny: Kita Siapkan Regulasi Digitalisasi yang Memadai



Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mengusung tiga pilar yaitu *ASEAN Matters*; *Epicentrum of Growth*; dan Implementasi *ASEAN Outlook on The Indo-Pasific*.

Menteri Komunikasi dan informatika Johnny G. Plate menyatakan isu digitalisasi ekonomi dan pariwisata menjadi bahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN karena Indonesia telah memiliki regulasi digitalisasi ekonomi.

"Kita telah menyiapkan regulasi yang memadai. Saat ini kan kita sudah punya Undang-Undang PDP (Pelindungan Data Pribadi). Yang perlu kita tindaklanjuti adalah aturan turunan sehingga ada hal-hal yang lebih teknis bisa diatur dengan baik," jelasnya usai Pertemuan Bilateral dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu (10/05/2023).

Selain UU PDP yang disahkan pada 20 September 2022 lalu, Pemerintah dan DPR RI tengah melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Revisi itu, menurut Menkominfo ditujukan untuk memberikan keadilan dalam ruang digital.

"Saya tentu berharap dalam revisi terbatas undang-undang ITE itu betul-betul dikedepankan *restorative justice* untuk masyarakat. Namun, untuk tindakan-tindakan yang luar biasa seperti TPPO (tindak pidana perdagangan orang), janganlah pakai *restorative justice* karena itu sangat merugikan masyarakat," jelasnya.

"Walaupun di UU PDP sudah ada tetapi belum meng-cover secara menyeluruh. Saya berharap bahwa revisi terbatas Undang-Undang ITE disamping kedepankan *restorative justice*, juga menyangkut perlindungan hak-hak anak dalam ruang digital," ungkapnya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Digital Vietnam Nguyen Manh Hung, Menkominfo mendiskusikan rencana kerja sama Indonesia dan Vietnam di sektor digitalisasi. Menteri Johnny dan Menteri Nguyen Manh Hung sepakat akan menyusun MoU untuk menindaklanjuti rencana kerja sama tersebut.

Selama pertemuan berlangsung, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong.

Menkominfo: Media Center KTT ke-42 ASEAN Sudah Siap!



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan fasilitas *media center* telah siap untuk mendukung aktivitas peliputan Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN oleh jurnalis dari luar negeri dan dalam negeri.

"Jadi memang pengamatan saya secara keseluruhan *Media Center* KTT ASEAN ke-42 ini sudah siap," tegasnya saat meninjau lokasi media center di Hotel Bintang Flores, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (08/05/2023).

Menteri Johnny menjelaskan fasilitas yang bisa digunakan jurnalis mencakup ruang kerja, jaringan LAN (*local area network*) untuk melakukan komunikasi dengan cepat.

"Sudah tersedia *bandwidth*-nya cukup. Tadi saya cek *uplink* dan *downlink*-nya cukup cepat," ujarnya.

Menurut Menkominfo, seluruh fasilitas yang tersedia itu telah bisa menayangkan informasi saat Presiden Joko Widodo memberikan *media briefing* hari ini.

"Tadi juga saya monitor, *media briefing* Presiden Jokowi berjalannya dengan baik dan cepat. Kesiapannya sudah cukup dengan keterbatasan yang ada di labuan Bajo, tetapi kita lakukan layanan media dengan *benchmark* G20 di Bali yang lalu," jelasnya.

Saat meninjau fasilitas Media Center KTT ke-42 ASEAN, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Informasi Politik Hukum dan Keamanan Ditjen IKP Bambang Gunawan, serta Kepala Biro Humas Kominfo Rhina Anita.



“...fasilitas yang bisa digunakan jurnalis mencakup ruang kerja, jaringan LAN (*local area network*)”

Kolaborasi Kominfo dan TNI Perkuat Literasi Digital Sektor Pemerintahan



Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia bekerja sama memperkuat literasi digital sektor pemerintahan. Kegiatan itu ditandai dengan peluncuran Program Literasi Digital Sektor Pemerintahan di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada hari Selasa (13/06/2023).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Literasi Digital Nasional yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2021.

"Setiap tahunnya, program literasi digital ini ditargetkan untuk menjangkau peserta pelatihan dari seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya diarahkan untuk ASN dan sektor pemerintahan," jelasnya di Jakarta Pusat, Senin (12/06/2023)

Menurut Dirjen Samuel, Kementerian Kominfo menargetkan program Literasi Digital Nasional sebanyak 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi secara digital sampai tahun 2024.

"Pemerintah berharap pelatihan literasi digital dapat menjadi penopang dari Indonesia *Digital Nation* yang bertumpu pada Ekonomi Digital yang kuat," tandasnya.

Program Literasi Digital Sektor Pemerintahan merupakan upaya memperkuat empat aspek literasi digital yaitu *Digital Skills* atau Kecakapan Digital; *Digital Safety* atau Keamanan Digital; *Digital Culture* atau Budaya Digital; dan *Digital Ethics* atau Etika Digital yang difokuskan pada dua tema pokok yaitu "Transformasi Digital Aparatur Pemerintah" dan "Netralitas Aparatur Pemerintah".

Kegiatan hasil kolaborasi yang bertema "Literasi Digital Sektor Pemerintahan: Peningkatan Pemahaman di Bidang Teknologi Digital bagi Prajurit TNI di seluruh Indonesia", dihadiri langsung oleh Plt. Menteri Kominfo Mahfud MD dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Selain itu diikuti secara luring oleh Perwira Tinggi TNI dan daring/virtual oleh seluruh prajurit TNI.





Solusi Kota Cerdas, Kominfo Tingkatkan Kolaborasi dan Sinergi

Kementerian Komunikasi dan Informatika meningkatkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah kabupaten dan kota untuk menghadapi tantangan dan meningkatkan inovasi layanan publik sebagai solusi mewujudkan Kota Cerdas.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana menyatakan dengan kerja sama dan berbagi pengalaman, setiap pemerintah kabupaten dan kota dapat memanfaatkan potensi dan sumberdaya di masing-masing daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

"Karena kolaborasi dan sinergi, kabupaten atau kota dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengembangan *Smart City*," jelasnya dalam Evaluasi Implementasi Program *Smart City* Tahap I: Mencerdaskan Kota dan Kabupaten untuk Indonesia Cerdas yang berlangsung dari Surabaya, Senin (12/06/2023).

Menurut SAM Kominfo Hadiyana, kolaborasi yang dikembangkan pemerintah hingga dunia usaha, dan masyarakat akan dapat membentuk ekosistem digital yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pembangunan kota.

"Dunia usaha dapat memberikan dukungan teknologi, inovasi, dan investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan *Smart City*. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan, *feedback*, dan data yang berguna untuk pengembangan Kota Cerdas," ujarnya.

Menurut Mochamad Hadiyana, kolaborasi dan sinergi juga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih program, pemborosan anggaran, serta ketidaksesuaian dan misi dalam pengembangan *Smart City*.

"Mari kita bersama-sama untuk menghilangkan tantangan ini dengan berkolaborasi dan bersinergi antara kabupaten dan kota, serta meningkatkan inovasi," ajaknya.

“Kominfo menggagas Gerakan Kota Cerdas sebagai satu solusi pengelolaan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)”

Master Plan

Sementara Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel A. Pangerapan dalam tayangan video meyakini transformasi digital berpengaruh besar terhadap perencanaan kota. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menggagas Gerakan Kota Cerdas sebagai satu solusi pengelolaan kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Ide bagaimana memberikan pedoman ataupun memberikan pelatihan bagi daerah, bagaimana sih menyusun *master plan* untuk membangun sebuah daerah baik itu kabupaten atau kota menjadi kabupaten atau kota yang smart karena *Smart City* itu tidak bisa dibangun dalam satu hingga dua tahun,” ungkapnya.

Dengan memiliki *master plan*, Dirjen semuel menilai, pemerintah daerah dapat mengetahui tahapan dan urgensi dalam mencapai pembangunan *Smart City*.

“Sehingga bisa memutuskan, tetapi harus tahu dulu apa yang ingin dicapai dalam pembangunan *Smart City* di tempat itu,” ungkapnya.

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika, Bambang Dwi Anggono menjelaskan Gerakan Menuju *Smart*

City dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memantau perkembangan program dan kegiatan Kota Cerdas yang dilakukan di daerah dari tahun ke tahun.

“Agar peningkatannya bisa dipantau dan bisa dikolaborasikan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain,” tandasnya.

Forum *Smart City* merupakan kegiatan rutin setiap tahun. Program *Smart City Indonesia* ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pembinaan *Smart City* oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tahun ini, forum tersebut diselenggarakan di Surabaya, pada tanggal 12 s.d. 14 Juni 2023.



Hadir dalam acara antara lain Walikota Surabaya, Walikota Magelang, Bupati Magetan, Bupati Siak, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Banggai, Bupati Agam, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Deli Serdang, Bupati Penajam Paser, Bupati Nagari Raya, PJ Bupati Bekasi, PLT Bupati Langkat, PJ Bupati Barito Selatan, serta pimpinan daerah se-Indonesia.

Menteri Mahfud Kukuhkan Komisioner KPI dan Dewas LPP TVRI



Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengukuhkan sembilan orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan lima orang Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Dalam acara itu, Plt Menkominfo mendorong Komisioner KPI Pusat dan Dewan Pengawas LPP TVRI mengemban amanat agar menjadikan penyiaran Indonesia lebih baik.

"Pada kesempatan ini, kita bersama-sama menyaksikan pengukuhan Komisioner Komisi KPI dan Dewan Pengawas LPP TVRI terpilih yang kepada mereka dipercayakan amanat baik sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dan wadah aspirasi masyarakat maupun penyedia layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa", tuturnya dalam Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Komisioner KPI dan Dewas TVRI, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/06/2023).



Menurut Plt. Menkominfo Mahfud MD, pengukuhan ini menandai babak baru dalam komitmen untuk menjunjung tinggi standar integritas, akuntabilitas, dan keunggulan dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

"Indonesia memiliki keunikannya sendiri baik secara geografis maupun secara demografis dan kemasyarakatan. Hingga saat ini, Indonesia terus bertransformasi dalam menghadirkan informasi yang terpercaya bagi seluruh penduduk Indonesia, yang tidak hanya ada di perkotaan namun juga di pedesaan hingga pulau-pulau terpencil," jelasnya.

Transformasi Digital Penyiaran

Kepada Komisioner KPI dan Dewas TVRI, Plt. Menkominfo menegaskan agenda transformasi digital nasional telah membawa perubahan khususnya di dunia penyiaran.

Menteri Mahfud MD menilai masih banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam menghadirkan siaran yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan transformasi digital harus dijalankan sesuai dengan prinsip inklusivitas, memberdayakan, dan berkelanjutan.

"Inklusivitas baik dari sisi akses dan penyediaan infrastruktur hingga kebermanfaatannya bagi masyarakat luas, memberdayakan dan memberikan nilai tambah serta berkelanjutan dalam jangka panjang," tandasnya.

Plt. Menkominfo meminta Komisioner KPI dan Dewan Pengawas LPP TVRI beserta seluruh lembaga penyiaran publik dan televisi swasta untuk memastikan penyiaran dan media yang sehat, bermutu, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu. Terlebih untuk mengambil peran dalam menjaga ruang digital dari berbagai konten hoaks.

Sembilan orang Komisioner KPI yang dikukuhkan:

1. Ubaidillah
2. Mohamad Reza
3. I Made Sunarsa
4. Muhamad Hasrul Hasan
5. Tulus Santoso
6. Amin Shabana
7. Evri Rizqi Monarshi
8. Mimah Susanti
9. Aliyah

Lima orang Komisioner KPI yang dikukuhkan:

1. Agnes Irwanti
2. Agus Sudibyo
3. Danang Sangga Buwana
4. Hardly Stefano Fenelon Pariela
5. Sifak

Dalam acara itu hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail sebagai saksi.

Hadir pula Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, serta Staf Ahli Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana dan Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Wijaya Kusumawardhana.

Acara Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Jabatan juga dihadiri oleh pejabat Kementerian Kominfo, Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2017-2022, Ketua KPI Pusat periode 2019-2022, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Wakil Ketua KIP Pusat, Direktur Utama LPP TVRI, perwakilan Dewan Pers dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, serta Pejabat Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.



Ini Strategi Kominfo Cegah Generasi Muda Terjebak TPPO



Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan sejumlah strategi untuk mencegah masyarakat terjebak Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong menyatakan strategi yang ditujukan untuk generasi muda tersebut antara lain literasi digital, melakukan pemblokiran situs terindikasi TPPO, koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan memproduksi konten terkait bahaya TPPO.

Menurut Dirjen Usman Kansong, Kementerian Kominfo menjalankan peran yang berkaitan dengan upaya menghadapi modus penipuan melalui media daring melalui media sosial atau media online (*online scamming*).

“(Strategi) Pencegahan yang kami lakukan dan penindakan yang pertama adalah literasi digital jadi edukasi dan pemberian wawasan kepada

masyarakat terkait online scam melalui berbagai kanal media,” ujarnya dalam webinar “Sinergi Pencegahan dan Penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang digelar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat, Senin (26/06/2023).

Strategi kedua, pemblokiran situs terindikasi melakukan TPPO. Hal itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan menutup atau *take down*, berdasarkan rekomendasi kementerian dan lembaga terkait.

Strategi ketiga, yakni melakukan koordinasi dengan Kemenlu dan BP2MI Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dinilai penting untuk pemetaan isu dan data terkait persiapan strategi komunikasi publik yang akan diterapkan.

Selanjutnya, strategi keempat, yakni konten iklan layanan masyarakat yang menekankan bahaya TPPO, akan dipasang di daerah atau wilayah-wilayah yang menjadi sasaran tindak pidana tersebut, termasuk di luar negeri.

“Kemudian (strategi kelima) melaksanakan sosialisasi dengan tema perlindungan dan hak pekerja migran,” tandas Dirjen IKP Kementerian Kominfo.

Menurut Dirjen Usman Kansong, strategi komunikasi yang dilakukan untuk mencegah masyarakat terjerat dengan skema online scammer dengan meningkatkan kesadaran dan literasi pencari kerja dalam mencari informasi lowongan pekerjaan terutama di media *online*.

Lebih lanjut Dirjen Usman Kansong mengatakan, target strategi komunikasi Kominfo itu adalah generasi muda lulusan SMA hingga perguruan tinggi, khususnya yang baru lulus (*fresh graduate*) dan sedang mencari pekerjaan dan lokasi terbanyak terjadinya penipuan online terkait TPPO.

Startup Studio Indonesia Jawab Tantangan Early-Stage Startup Hadapi Ketidakpastian Pasar



Program *Startup Studio Indonesia* (SSI) dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) membantu *early-stage startup* dalam menghadapi ketidakpastian pasar agar lebih siap untuk *go extra miles*.

"Pada program SSI kami bantu startup melalui literasi penyempurnaan produk, model bisnis, serta perbaikan retensi pengguna, sebelum mereka memasuki tahap ekspansi pasar," ujar Direktur Jenderal Aptika, Samuel A. Pangerapan saat pembukaan acara *Milestone Day Batch 6 SSI "Celebrating Post-Accelerator Milestones: Exploring Strategies & Lessons Learned"* di Jakarta, Jumat (23/06/2023).

Dengan begitu, lanjut Dirjen Samuel, diharapkan *startup* yang bergabung untuk dapat mengakselerasi skala bisnisnya dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan pendanaan dari *venture capital*.

Tidak hanya itu, menurut Dirjen Samuel, program ini juga bertujuan membangun semangat kolaborasi antara pelaku *startup* untuk bersama-sama membangun ekosistem digital.

"Ini dilakukan melalui transfer pengetahuan, pembangunan karakter dan kompetensi *startup* yang berdaya saing tinggi," tambahnya.

Ia menyebut, sejak meluncurkan SSI *Batch 1* di tahun 2020 hingga kini telah mencapai puncak rangkaian *Batch 6*, ada 97 *startup* digital yang telah dibina. Bahkan sebanyak 26 *startup* berhasil mendapatkan investasi tahap awal dari *venture capital*.



Startup Studio Indonesia adalah sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memfasilitasi *startup* digital yang sedang dalam proses mencapai tahap *product-market fit* dengan *traction* yang menjanjikan dan memiliki *founder* yang potensial.

Ditjen SDPPI Resmikan Pembukaan New Locket Pelayanan Publik



...ini adalah sebuah lompatan besar dari proses perizinan dibanding proses yang dahulu kala di mana proses perizinan bisa berminggu-minggu, kini sudah one day service

Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika meresmikan pembukaan *New Locket* Pelayanan Publik di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Jumat (23/6).

"Inovasi atau *improvement* terhadap pelayanan publik tidak pernah berhenti, ini adalah sebuah lompatan besar dari proses perizinan dibanding proses yang dahulu kala di mana proses perizinan bisa berminggu-minggu, kini sudah *one day service*," kata Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dr Ismail MT.

Meski demikian, Ismail mengingatkan agar seluruh awak Ditjen SDPPI untuk tak cepat berpuas diri dalam berinovasi.

"Dari segi proses ini sudah sangat cepat namun *room of improvement* senantiasa kita berdayakan terus menerus dan ujungnya yang paling penting adalah testimoni atau kesaksian dari para *stakeholders* karena kami dari direktorat SDPPI bertugas untuk senantiasa berusaha namun *outputnya* baru terbukti saat seluruh *stakeholders* merasakan dampaknya," katanya.

New Locket Pelayanan Publik Ditjen SDPPI tersebut berfungsi memberikan pelayanan publik seperti konsultasi, informasi, asistensi hingga penanganan pengaduan terkait perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio serta sertifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi dan kalibrasi serta pengujian perangkat telekomunikasi.



Prasarana Lengkap dan Canggih

Loket pelayanan publik baru ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana canggih yang mendukung layanan *Next Generation Licensing* seperti adanya mesin antrian modern yang mudah dioperasikan hingga robot pintar R2S2 yang siap membantu melayani kebutuhan pengunjung mulai dari mencari informasi layanan, pengukuran suhu tubuh, informasi cuaca hingga mendistribusikan *snacks* dan minuman gratis.

R2S2 merupakan kependekan dari *Robot Goes To Spectrum Services*.

"Robot ini merupakan 100 persen buatan anak bangsa, kerjasama perdana antara Ditjen SDPPI bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya," kata Direktur Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dr Ismail MT saat peresmian New Loket Pelayanan Publik di Gedung Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Jumat (23/6).

Robot R2S2 diharapkan dapat menjadi bagian dari etalase modernisasi pelayanan Ditjen SDPPI yang berorientasi teknologi canggih dan terdepan tanpa melupakan sentuhan humanis sejalan dengan perubahan perilaku pengguna layanan yang aktif dan senang membagikan pengalaman serta penilaian terhadap kualitas pelayanan publik di media sosial

Adapula *play room* dengan beragam wahana permainan edukatif bagi pengunjung yang membawa anak selain ruang baca digital bagi pengunjung.

Bagi para ibu menyusui, tersedia ruang laktasi nyaman yang lengkap dengan berbagai keperluan sang buah hati.

Loket pelayanan baru ini juga ramah terhadap para penyandang disabilitas di mana tersedia sejumlah fasilitas yang mampu memberi kemudahan bagi para pengunjung disabilitas mulai dari lahan parkir, kursi roda hingga meja pelayanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus atau disabilitas.

Sarana lain yang tersedia di loket pelayanan tersebut adalah adanya Pengelola Pengaduan (Ketersediaan sarana pengaduan masyarakat, di antaranya : *Mobile Apps* ADEYA, *Contact Center* 159, dan *New Loket* Ditjen SDPPI, *WhatsApp* Pelayanan (WAYAN), Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan (*Medsos*, WAYAN) *Contact Center* dengan pejabat/petugas pengelola pengaduan (SATGAS) yang senantiasa berjaga.

Sebelumnya, Loket pelayanan Publik Ditjen SDPPI terletak di Gedung Sapta Pesona, Gedung Menara Merdeka, dan Gedung Wisma ANTARA.

Masyarakat yang ingin mengurus permohonan izin, kini bisa melakukan registrasi di situs resmi Ditjen SDPPI yakni: <https://layanan.kominfo.go.id>.



Ditjen Aptika Ajak OPD dan UMKM Sumba Timur Manfaatkan Tanda Tangan Elektronik

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumba Timur untuk memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

"TTE adalah sebuah mode tertentu untuk melakukan tanda tangan dan segel elektronik

(tanda tangan yang dikeluarkan oleh badan usaha). TTE bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau dokumen secara unik. Oleh karena itu, kami mengajak pemerintah daerah dan UMKM untuk dapat menggunakan tanda tangan digital dalam transaksi yang dikerjakan," ujar Plt. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Teguh Arifiyadi dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Sertifikat Elektronik untuk Pemerintahan dan UMKM di Sumba Timur, Rabu (07/06/2023).



Pelatihan *Vocational School Graduate Academy (VSGA)* dengan skema pelatihan Operator Komputer Madya, *Video Editor*, dan *Junior Graphic Designer* dilaksanakan melalui Kerjasama Kemitraan DTS antara BBPSDMP Kominfo Medan dan Pemerintah Kab. Aceh Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah yang dilaksanakan selama 5 (lima) hari dari tanggal 05-09 Juni 2023 yang diikuti oleh 75 orang peserta. Pembinaan dalam kegiatan ini sepenuhnya difasilitasi oleh DIPA BBPSDMP Kominfo Medan. Kegiatan ini akan dipandu oleh para instruktur yang berpengalaman yang telah lulus sertifikasi *training of trainer* pada bidangnya masing-masing. Senin (05/06/2023).

Pelatihan VSGA Skema Operator Komputer Madya, Junior Graphic Design dan Video Editor di Kab. Aceh Tengah

Ditjen SDPPI Ajak Stakeholder Wujudkan Indonesia Merdeka Blankspot



Demi memenuhi ekspektasi pengguna layanan seluler di Indonesia yang terus meningkat, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengajak operator seluler berkolaborasi untuk tuntaskan *blankspot* di Indonesia.

"Kolaborasi dan gotong royong *is gold*, saya paham teman-teman operator saling bersaing tapi kita memiliki satu tujuan yang sama dan saya yakin dengan itu kita bisa mencapai Indonesia yang kita inginkan yaitu Indonesia bisa merdeka dari *blankspot*" ucap Direktur Penataan Sumber Daya Denny Setiawan, Senin (26/6/2023).

Denny menyampaikan hal tersebut saat menjadi panelis pada kegiatan *The 20th Annual Selular Awards 2023 "Moving to the Next Level"* pada sesi diskusi dengan tema Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi & Pertumbuhan Ekonomi yang bertempat di Park Regis Arion Jakarta.

Pada kegiatan ini Denny Setiawan juga menyinggung terkait update terakhir *Analog Switch Off* yang semakin mendekat. "20 juni Makassar sudah *switch off* dan mudah-mudahan sebelum hari kemerdekaan sudah ASO

seluruhnya sehingga 700 Mhz bisa dipakai dan kita bisa membebaskan spektrum untuk peluasan *cover5G* dan bisa cepat terealisasi" ucapnya.

Acara dibuka oleh CEO & *Editor in Chief* Seluler Uday Rayana, Ia menjelaskan bahwa berkembangnya *sharing economy*, maka langkah sinergi menjadi keniscayaan yang menguntungkan berbagai pihak. Korporasi juga bisa membuat aliansi dengan perusahaan lain, bahkan pesaing, untuk menciptakan jaringan penawaran dan layanan yang saling melengkapi. Ekosistem bisnis yang dihasilkan dapat menentukan skala di tingkat nasional maupun global.

Pada kegiatan ini juga Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Ismail mendapatkan penghargaan pada kategori *Special Awards "Excellence in Performance"*. Penerimaan penghargaan diwakilkan oleh Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Widodo Muktiyo.

Hadir mendampingi Direktur Penataan Sumber Daya Denny Setiawan, Ketua Tim Penataan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio dan Dinas Tetap dan Bergerak Darat Adis Alifiawan.

UMKM Perlu Menjaga Data Pribadi untuk Mencegah Kejahatan Digital



Menjaga data pribadi penting untuk dilakukan tidak terkecuali bagi para UMKM, hal tersebut guna menghindari dari kejahatan digital. Untuk itu dibutuhkan pemahaman literasi digital yang baik tentang perlindungan data pribadi.

“Menjaga privasi data pribadi itu penting, karena belakangan ini pembobolan data digital itu sering terjadi. Oleh karena itu dalam membuat *password* jangan dari data yang mudah ditebak, contohnya tanggal lahir,” ujar *Trainer Program GoNusantara GoTo Group*, Rizqi Mulyantara dalam sesi kelas UMKM bersama GoTo pada kegiatan Gali Ilmu Literasi Digital Surabaya di *Ballroom Palm Park Hotel*, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/06/2023).

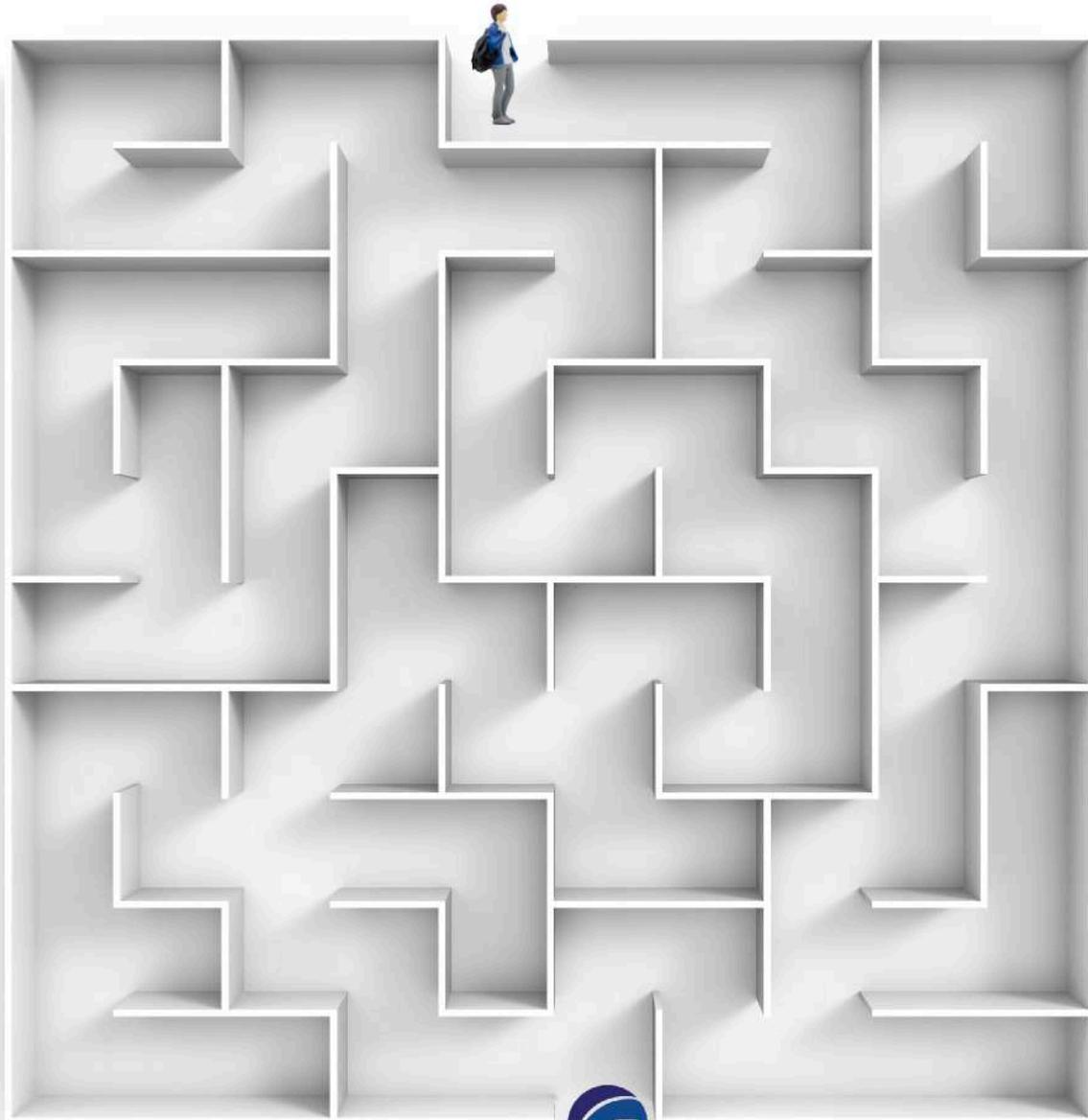
Pembuatan *password* dengan menggunakan tanggal lahir, lanjut Rizqi, harus dihindari. Ia menyarankan untuk memanfaatkan aplikasi *notes* yang ada di masing-masing *handphone* pelaku UMKM agar tidak lupa dengan *password* yang telah dibuat.

Dalam kesempatan yang sama, CEO Next Generation Indonesia, Khemal Andrias, menyampaikan bahwa masyarakat harus memiliki modal yang cukup untuk melawan kejahatan digital seiring bertambahnya konten negatif yang bermunculan di sosial media.

“Jadi apa modalnya? Modalnya itu adalah CABE, yang dimana itu adalah dengan menguasai 4 pilar literasi digital yaitu Cakap, Aman, Budaya, dan Etika dalam bermedia digital.” ucapnya.

Kegiatan Gali Ilmu Literasi Digital merupakan salah satu upaya literasi digital untuk segmen masyarakat umum dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

“...dengan menguasai 4 pilar literasi digital yaitu Cakap, Aman, Budaya, dan Etika dalam bermedia digital”



Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet / Share / Like / Follow / Subscribe / Love / Comment

SELAMAT IDULADHA 1444 H

"Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan
berkurbanlah" (Al-Kautsar:2)

29 Juni 2023

